



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 17 Februari 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Evaluasi Penanganan Permasalahan Pertanahan (rapat lanjutan tanggal 18 Januari 2022)
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH. /Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 39 (tiga puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI dari 52 (lima puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda evaluasi penanganan permasalahan pertanahan (rapat lanjutan tanggal 18 Januari 2022), hari Kamis, 17 Februari 2022, dibuka pukul 10.46 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,

dengan agenda evaluasi penanganan permasalahan pertanahan (rapat lanjutan tanggal 18 Januari 2022), sebagai berikut:

1. Salah satu tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2020 dan Perpres No. 48 Tahun 2020 adalah perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
2. Jumlah Sengketa, Konflik Perkara dan Kasus Kejahatan Pertanahan (Sengketa/Konflik yang mengandung unsur pidana) pada tahun 2021 di seluruh wilayah adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah kasus pertanahan total sebanyak 8.111 kasus
 - b. Target DIPA penanganan total sebanyak 1.744
3. Menteri ATR/BPN RI menyampaikan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN RI tahun 2021 sebesar 90,76%.
4. Penjelasan Menteri ATR/BPN RI menyampaikan hasil penanganan kasus pertanahan sebanyak 8.111 kasus dan dapat menyelesaikan sejumlah 1.591 kasus.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda evaluasi penanganan permasalahan pertanahan dan lain-lain, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI dapat menerima penyampaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN RI tahun 2021 sebesar 90,76% dan meminta Kementerian ATR/BPN RI meningkatkan kinerjanya agar tingkat penyerapan anggaran tahun 2022 dapat lebih dioptimalkan.
2. Terkait dengan hasil penanganan kasus pertanahan, dimana dalam penjelasan Kementerian ATR/BPN RI mengenai target penanganan kasus sebanyak 8.111 kasus, namun hanya dapat diselesaikan sejumlah 1.591 kasus, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI untuk lebih meningkatkan kinerja terhadap penyelesaian dan penanganan konflik dan sengketa pertanahan.
3. Terhadap penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi data terkait proses penyelesaian konflik dan sengketa agar tidak terjadi tumpang tindih data pada proses penerbitan sertifikat hak atas tanah.
 - b. Meningkatkan target dan realisasi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan seluruh provinsi, kabupaten dan kota.
 - c. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar penyelesaian mafia tanah dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dalam melakukan penanganan kasus pertanahan berpihak pada rakyat dan konstitusi, keadilan, dan kemakmuran.
4. Untuk mencukupi ketersediaan cadangan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria, Komisi II DPR RI mendorong percepatan pengelolaan Bank Tanah dan meminta agar dalam operasional pengelolaan Badan Bank Tanah, memperhatikan:
 - a. Perolehan tanah, pengelolaan tanah dan pemanfaatan tanah
 - b. Pengidentifikasian dan penertiban administrasi pertanahan atas aset Bank Tanah
 - c. Kesesuaian perencanaan tata ruang
 5. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk segera mengajukan kepada Presiden terkait pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Badan Bank Tanah.
 6. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN RI segera membangun komunikasi intensif kepada Ketua MA untuk menempatkan hakim *Adhoc* pertanahan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
 7. Terkait dengan irisan kewenangan Kementerian ATR/BPN RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengenai hak-hak atas tanah masyarakat yang menjadi kawasan hutan, penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan, tanah instansi Pemerintah dalam kawasan hutan, dan hak atas tanah yang masuk dalam kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB), Komisi II DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk melaksanakan rapat gabungan dengan Kementerian KLHK bersama dengan Kementerian ATR/BPN RI.
 8. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN meninjau ulang Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk memberikan

kepastian hukum kepada masyarakat serta melindungi masyarakat dari praktek mafia pertanahan.

9. Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN sepakat untuk mengikutsertakan Komisi II DPR RI dalam pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN di daerah pemilihan masing-masing.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.44 WIB.

Jakarta, 17 Februari 2022

KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH. *Handwritten initials*

A-142